

SULTAN RESMIKAN GEDUNG INSPEKTORAT DIY

## Pencegahan Korupsi Harus Didukung Penguatan Kelembagaan

**YOGYA (KR)** - Pencegahan korupsi harus didukung dengan penguatan kelembagaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi anti korupsi nasional. Disamping itu juga harus disertai penguatan komitmen kepemimpinan, baik di pusat maupun daerah.

"Momentum ini bisa dijadikan titik kembang Inspektorat DIY sebagai penanda peningkatan kualitas pengawasan. Kemegahan bangunan gedung baru adalah prasarana fisik. Prasarana ini akan mendukung kinerja instansi untuk serius melakukan pengawasan. Faktor SDM yang menjadi pengelola dan pengawas di dalam gedung Inspektorat ini menjadi faktor mutlak. Saya berharap agar peningkatan fisik ini harus didukung oleh peningkatan kualitas modal manusia dan inovasinya," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat meresmikan Gedung Inspektorat DIY, di Semaki, Umbulharjo, Rabu (26/10).

Sultan mengungkapkan, guna mewujudkan good governance di lingkungan Pemda DIY, ada tiga upaya yang dapat ditempuh. Yaitu up-grading kompetensi ASN, pen-dayagunaan TIK dan community engagement. Up-grading ASN dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, peningkatan skill literasi keuangan bagi aparatur negara, formulasi penerapan tingkat kompensasi yang adil, serta membangun mekanisme pelaporan yang kredibel dan aman.

"Momentum peresmian ini, menuntut Inspektorat agar mampu beradaptasi dan berkomunikasi mengintegrasikan nilai-nilai dan strategi,

membentuk satu kekuatan dalam satu kultur kinerja. Dengan demikian, energi seluruh komponen dapat fokus pada pencapaian tujuan strategis yang telah digariskan. Semua merupakan modal penting dalam proses manajemen sumberdaya," terangnya.

Dalam kesempatan itu Inspektur Inspektorat DIY Muhammad Setiadi mengatakan, gedung tersebut dibangun sejak 2019. Dimana pada akhirnya gedung tersebut selesai dibangun pada 2022. Selama tiga tahun pembangunan mengalami sedikit keterlambatan karena Pandemi Covid -19. Sumber pendanaan berasal dari APBD DIY dengan total pengeluaran sebesar Rp 3 miliar.

"Fasad gedung menggunakan arsitektur bergaya tradisional Jawa. Sesuai dengan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 yang wajib mendapatkan rekomendasi dari de-

wan pertimbangan pelestarian warisan budaya DIY," tandasnya.

Lebih lanjut Muhammad Setiadi menambahkan, selain mengadopsi gaya arsitektur tradisional Jawa, gedung 4 lantai seluas 3.230 meter persegi itu juga diperindah dengan motif Batik Sidomukti dan Kawung pada sebagian besar bangunannya. Pemilihan motif batik ini bermakna sejahtera dan mulia. Guna menggambarkan keterbukaan dan akuntabilitas, gedung itu mayoritas menggunakan bahan material kaca. Dilengkapi dengan sarana pendukung sebagai quality assurance.

"Gedung ini dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang investigasi, ruang Saber Pungli. Selain itu juga ada ruang acuan dari Komisi Advokasi Daerah, perpustakaan, depo arsip, aula pertemuan, sarana dan prasarana implementasi Pengharustamaan Gender dan lainnya," tandasnya. **(Ria)-f**

## Milad ke-59, SDM Sokonandi Mencari Bakat



KR-Franz Boedisukamanto

**Panitia Milad SD Muhammadiyah Sokonandi ke-59 berfoto bersama Dirut KR usai audiensi.**

**YOGYA (KR)** - Menyambut Milad ke-59 SD Muhammadiyah Sokonandi, digelar berbagai kegiatan untuk memberikan wadah bereksistensi dan ajang kompetisi sehat menumbuhkan kecintaan pada tanah air Indonesia. Sokonandi Mencari Bakat (SMB) dihelat Sabtu (5/11) di 2 kampus SD Muhammadiyah Sokonandi, Jalan Kapas No 5A Semaki Umbulharjo dan di Jalan Notowinatan, Gunungketur, Pakualaman.

"SMB meliputi lomba mewarnai, tahfidz, senam ceria beregu, adzan dan daci. Serta memberikan apresiasi pada guru TK lingkungan Kota Yogya dengan workshop peningkatan kemampuan guru," tutur Ketua Panitia Amroni Supriyadi ST SPd MPd saat bersilaturahmi dengan Dirut PT BP Kedaualatan Rakyat (KR) M Wirmon Samawi SE MIB, Rabu (26/10).

Didampingi Ketua Komite Yusa Indra, Kepala Sekolah 1-2 Anis Rofiah ST H SPd M Si, H Sofyan SSI MPd, Sekretaris Panitia Yuki Sukiman SPd, Wakil Ketua Milad Suranto, Humas Sriningsih Wahyu dan Komite Prima O, rombongan disambut Dirut KR, Komisaris Utama PT BP KR Prof Dr Inajati Andrisijanti, dan Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) KR Drs H Ahmad Luthfie MA.

"Puncak Acara Milad, 7 Januari 2023 dengan kegiatan jalan sehat seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta. Sebelumnya rangkaian Milad dibuka dengan Pekan Maulid pada Kamis, 29 September 2022," jelas Amroni.

Beragam kegiatan Milad ini diharapkan bisa meningkatkan kematangan mental anak melalui bahasa visual (gambar), kinestetik dan rasa percaya diri. "Memantapkan kemampuan anak untuk berkompetisi sehat dengan tetap bertumpu pada rasa persatuan dan rasa menghormati kemampuan orang lain, serta mengokohkan rasa peduli orangtua terhadap perkembangan jiwa anak," jelas Anis menambahkan

Disebutkan pendaftaran lomba 10 September 2022 s/d 28 Oktober, jam kerja. Technical meeting SMB dilaksanakan Jumat (28/10) di Masjid Attanwir SDM Sokonandi. "Lomba di SMB memperebutkan Piala DPD RI, DPRD I Provinsi DIY, DPRD II Kota Yogyakarta, PP Muhammadiyah, PWM DIY, PDM Kota Yogyakarta, Sponsor," jelas Sofyan lebih lanjut.

Dirut KR Wirmon Samawi mengapresiasi rangkaian Puncak Milad SD Muhammadiyah Sokonandi Ke-59. "Menjadi ajang kreativitas dan persaudaraan yang meredakan SDM Sokonandi dengan masyarakat," ucapnya. **(Vin)-f**

## KONGRES XXII PERSATUAN TAMANSISWA

### Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Modal Menikmati Kemerdekaan

**YOGYA (KR)** - Pemikiran Ki Hadjar Dewantara menjadi modal menikmati kemerdekaan. Tamansiswa mengajarkan merdeka belajar, belajar untuk merdeka. Apa yang ada di Tamansiswa layak menjadi contoh dan perlu untuk disebarkan ke seluruh Indonesia.

Hal itu dikemukakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemendikbud) Ir Aris Darmansyah Edy Saputra MEng, saat memberikan ceramah umum pada pembukaan Kongres XXII Persatuan Tamansiswa dan Kongres XXI Badan Pusat Wanita Tamansiswa, di Pendapa Agung Tamansiswa Yogyakarta, Rabu (26/10).

"Di Tamansiswa, semua

sudah tertata, terstruktur. Tamansiswa yang sudah berumur 100 tahun tentu sudah matang," kata Aris Darmansyah.

Menurutnya saat ini pemerintah sedang menyiapkan generasi unggul untuk menyongsong tahun 2045 yang akan datang. Di antaranya dengan revitalisasi SMK dan pelatihan vokasi. Pemerintah akan meningkatkan kompetensi siswa, menugaskan Menko PMK dengan membentuk tim koordinasi nasional yang melibatkan tujuh kementerian terkait dan satu lembaga. Nantinya akan ada sistem informasi kerja yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Kongres XXII Persatuan Tamansiswa dan Kongres XXI Wanita Tamansiswa dibuka oleh Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan



KR - Warisman

**Ki Prof Edi Swasono memukul gong tanda pembukaan kongres.**

Tamansiswa (MLPTI) Ki Prof Dr Sri Edi Swasono dengan memukul gong didampingi Ketua Badan Pusat Wanita Tamansiswa Nyi Jajuk Herawati, dan Panitera Umum Ki Saur Panjaitan, perwakilan keluarga Ki Hadjar Dewantara Ki Nanang Reto Wulanjojo. Kongres dihadiri perwakilan cabang Tamansiswa dari seluruh Indonesia, tamu undangan dari Forum Komu-

nikasi Pimpinan Daerah DIY, dan undangan lainnya di antaranya Direktur Utama PT BP Kedaualatan Rakyat M Wirmon Samawi SE MIB.

Sri Edi Swasono menyatakan, sekarang Tamansiswa sudah tersebar dari Medan sampai ke Morotai di Maluku Utara. Ia juga memperkenalkan wakil atau utusan dari Cabang Morotai dan Nusa Tenggara Timur. Kedua cabang tersebut meru-

pakan cabang yang relatif masih baru.

Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada enam orang yang telah lebih dari 45 tahun mengabdikan di Tamansiswa. Di antaranya Ki Mudjiyono, Ki Maryono dari Tamansiswa Nanggulan, Ki Prabowo Tamansiswa Binjai, Ki Sugeng Pramono Tamansiswa Jakarta, Ki Surip Salanto Tamansiswa Telukbetung, dan almarhum Ki Agus Surono dari Tamansiswa Jawa Timur.

Sementara Ki Saur Panjaitan menyebutkan peserta kongres sekitar 600 orang, baik Persatuan Tamansiswa maupun Wanita Tamansiswa. Kegiatan sudah di dahului dengan ziarah di makam Ki Hadjar Dewantara di Taman Wijaya Brata Yogyakarta, Selasa (25/10).

**(War)-f**

## SEKDA APRESIASI TIGA OPD TERBAIK

### Kearsipan Kota Yogya Masuk Kategori Sangat Memuaskan

**YOGYA (KR)** - Pengelolaan kearsipan di Kota Yogya berhasil masuk kategori sangat memuaskan. Hal itu berdasarkan hasil penilaian Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Februari lalu yang menempatkan Pemkot Yogya sebagai terbaik pertama Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) tingkat nasional.

Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuridjaya, mengungkapkan dalam penilaian tersebut Pemkot Yogya memperoleh nilai 94,62. "Peringkat itu cukup luar biasa. Masuk dalam kategori AA atau sangat memuaskan. Tentu prestasi tersebut harus ditingkatkan dengan pengelolaan arsip di tiap OPD yang semakin baik," ungkapnya, Rabu (26/10).

Oleh karena itu setiap tahun pihaknya rutin melakukan evaluasi atas pengawasan kearsipan internal. Dalam laporan audit kearsipan internal yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogya tahun ini, terdapat 50 OPD di lingkungan Pemkot Yogya yang dinilai. Tiga OPD dengan

hasil terbaik ialah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Inspektorat.

Aman pun mengapresiasi ketiga OPD tersebut. Terlebih bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogya yang telah mengelola kearsipan di seluruh OPD baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dirinya juga berharap ke depan mulai dipertimbangkan standar teknis pengelolaan kearsipan di setiap unit kerja. "Dokumentasi di setiap OPD harus ditata sedemikian rupa, sebab ini merupakan hal yang penting dan perlu perhatian lebih agar sebuah dokumen menjadi pembukti jika diperlukan sewaktu-waktu," imbuhnya.

Di samping itu, dari penilaian tersebut salah satu hal yang sangat menentukan adalah tempat penyimpanan arsip. Terutama seperti mendesain tempat penyimpanan arsip, membuat label dan lain sebagainya. Hal ini supaya jika ada penghapusan arsip maka masing-ma-

sing OPD bisa menerapkannya berdasarkan standar dan teknis.

Sementara Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogya Suryatni, menjelaskan penilaian terhadap 50 OPD tersebut mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. "Dari hasil kegiatan pengawasan kearsipan internal menunjukkan peningkatan yang lebih baik atas penyelenggaraan kearsipan dan menjadi tolok ukur guna perbaikan penyelenggaraan kearsipan ke depan," ujarnya.

Apalagi mulai tahun ini hasil pengawasan kearsipan internal menjadi unsur penilaian dari pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh ANRI dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY. Dengan begitu dirinya berharap kegiatan tersebut mampu menambah kepedulian OPD terhadap pengelolaan kearsipan untuk mempersiapkan audit pengawasan internal tahun depan. **(Dhi)-f**

## KADER GISA DIAJAK PAHAMI IDENTITAS DIGITAL

### Tahap Awal Sasar 10 Persen Penduduk

**YOGYA (KR)** - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya menargetkan minimal 10 persen penduduk sudah beridentitas digital hingga akhir tahun ini. Identitas digital atau Digital ID tersebut diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022.

Kepala Dindikcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, menjelaskan seiring perkembangan teknologi digital maka segala kebutuhan termasuk Administrasi Kependudukan (Adminduk) juga mengalami peningkatan secara digital. "Sasarannya hingga akhir tahun nanti sebanyak 10 persen warga yang sudah beridentitas kependudukan digital. Hingga saat ini yang sudah melakukan verifikasi Digital ID adalah seluruh ASN Pemkot Yogya melalui pengunduhan aplikasi berbasis android di playstore," jelasnya, Rabu (26/10).

Pada tahap awal selain menyasar ASN Pemkot Yogya, Dindikcapil juga akan memperlakukan jempot bola di 14 kemantren dan 45 kelurahan untuk verifikasi Digital ID. Masyarakat sudah bisa mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kemu-

dian mengisi sesuai perintah seperti mengunggah foto dan pengisian data pribadi. Pihaknya pun telah membekali para kader Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) se-Kota Yogya agar mampu memahami identitas digital serta memberikan pendampingan di masyarakat.

Septi menjelaskan, melalui Digital ID nantinya KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK) di aplikasi IKD akan berubah menjadi identitas digital. Proses digitalisasi mencakup data KK, vaksin Covid-19, NPWP dan kepemilikan kendaraan. Sedangkan autentikasinya melalui verifikasi biometrik, kode verifikasi dan QR Code. "Bagi yang belum menggunakan telepon pintar juga tidak perlu khawatir. KTP elektronik maupun KK fisik masih bisa digunakan seperti biasa," terangnya.

Sementara Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuridjaya mengungkapkan dengan Digital ID maka akan lebih cepat mendapatkan informasi. Sehingga pemerintah mengajak para kader GISA untuk ikut mendorong masyarakat memverifikasi IKD mereka. **(Dhi)-f**

## FILOSOFI HAMEMAYU HAYUNING BAWANA

### Jadi Dasar Utama Reformasi Birokrasi DIY

**YOGYA (KR)** - Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Pemda DIY berdasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Selain itu, Pemda DIY juga memegang teguh dasar filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam manajemen pemerintahannya.

"Reformasi birokrasi melalui pembaruan tata pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan keberhasilan penyelenggaraan reformasi terpadu pelayanan publik. Dengan dasar filosofi tersebut, kondisi yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pemerintah yang andal, efisien dan transparan dalam suasana kehidupan yang aman dan tentram dalam kerangka otonomi daerah. Guna mewujudkan hal itu, aparatur Pemda DIY diharapkan dapat membangun pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari," kata Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X saat menerima kunjungan kerja DPR RI Komisi II di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Rabu (26/10).

Wagub menuturkan, aparatur Pemda DIY dalam membangun pola pikir, sikap,

dan perilaku dalam bekerja serta berinteraksi harus memperhatikan dan memegang teguh ajaran moral sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Atau konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab. Selain itu semua kegiatan organisasi perangkat daerah di Pemda DIY juga telah dilaksanakan secara terarah dan terukur. Hal itu kaitannya dengan kegiatan pembinaan serta pengawasan.

"Pemda DIY telah berhasil mendapatkan nilai AA sejak penilaian tahun 2018 dari Kementerian PAN dan RB RI. Selain itu selama 12 kali berturut-turut Pemda DIY memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI," ungkapnya.

Keberhasilan reformasi birokrasi pemerintahan, menurut Wagub dapat dilihat dari semakin berkurangnya jabatan struktural, serta berkurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menuju komposisi ideal, disiplin dan kinerja pegawai yang semakin meningkat. Selain itu, keberhasilan lainnya ialah berkurangnya duplikasi tugas dan fungsi,

semakin melembaganya Standard Operating Procedure, semakin sinkronnya produk hukum daerah, dan semakin terarahnya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan OPD.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal menyatakan, dalam kunjungan kerja kali ini, pihaknya ingin mengetahui beberapa hal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Salah satunya ialah tentang pelayanan masyarakat berbasis elektronik. Selain itu, persoalan pertanian juga ingin diketahui secara lebih mendalam sesuai Kesesuaian Kegiatan Penetapan Ruang (KKPR).

"Kami ingin mengetahui lebih dalam lagi soal perencanaan detail tata ruang yang ada, apa sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan bagaimana penyelenggaraannya," jelasnya.

Adapun soal persiapan Pemilu 2024, Syamsurizal mengungkapkan, Komisi II DPR RI ingin mengetahui perkembangan verifikasi faktual data pemilihan yang kini tengah dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, termasuk di DIY. **(Ria)-f**

## Regulasi Soal Kelompok Suporter Perlu Dirumuskan

**YOGYA (KR)** - Merespons tragedi Kanjuruhan Malang yang sangat memprihatinkan, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H Cholid Mahmud MT menggelar rapat kerja (raker) bersama sejumlah pihak di Ruang Serbaguna, Gedung DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Selasa (26/10).

Raker tersebut membahas soal pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bertema 'Tanggung Jawab Penyelenggara dan Organisasi Keolahragaan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan'. Pihak-pihak yang diundang antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Polda DIY, KONI DIY, Asosiasi Provinsi PSSI DIY, Brigata Curva Sud (suporter PSS Sleman), Brajamusti (suporter PSIM Yogya) dan Paserbumi (suporter Persiba Bantul).

Cholid menuturkan, tragedi Kanjuruhan Malang hanya melibatkan satu kelompok suporter saja, tetapi dampaknya bisa sangat luar biasa (jatuh banyak korban jiwa). "Pertanyaan besarnya, apakah regulasi-regulasi kita yang belum cukup memadai, sehingga terjadi tragedi itu, atau ada faktor

penyebab lain," terang Cholid kepada wartawan usai raker.

Menurut Cholid, jika melihat perkembangan olahraga (sepakbola) di Indonesia, kebanyakan klub-klub yang berkasus itu berlaga di liga profesional yang regulasinya ada di organisasi olahraga masing-masing. Sementara penyelenggara kompetisi liga profesional dilakukan oleh PT sehingga juga berorientasi bisnis.

"Karena sudah masuk sektor bisnis yang melibatkan banyak resources (uang), mestinya tanggung jawabnya juga harus tinggi, standar pengelolaan harus lebih tinggi, termasuk asuransi. Penonton harus ada asuransinya, semua itu bagian yang harus dipikirkan dalam setiap penyelenggaraan event yang bersifat profesional," katanya.

Terkait dengan suporter, dari masukan kelompok-kelompok suporter sepakbola di DIY, hampir tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus soal kelompok suporter tersebut. Menurut Cholid, masing-masing kelompok suporter itu membuat aturan sesuai kapasitas mereka masing-masing. **(Dev)-f**



KR-Devid Permana

**Cholid Mahmud**